

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan suatu proses pendidikan. Adanya usaha perbaikan pada bidang pendidikan merupakan salah satu wujud pembangunan di Indonesia. Seiring perkembangan peradaban manusia dalam tuntutan modernisasi dan globalisasi, pendidikan bermutu merupakan kebutuhan penting generasi Indonesia agar dapat bersaing ditingkat lokal maupun Internasional.

Pendidikan yang saat ini kondisinya telah disejajarkan dengan kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan, harus dapat diperbaiki arah lajunya. Semangat para orang tua untuk menyekolahkan anak mereka sampai pendidikan paling tinggi harus didukung oleh semua pihak, namun harapan tersebut harus kandas karena biaya pendidikan yang sangat mahal. Di sisi lain globalisasi yang harusnya dapat mewujudkan pendidikan yang berkeadilan ternyata hanya pemanis belaka.

Pendidikan Nasional Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia baik secara fisik maupun intelektual, sehingga mampu mengembangkan diri serta lingkungan dalam rangka pembangunan nasional. Manusia yang berkualitas telah terkandung jelas dalam Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia yang termaktub dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 (2003:7). Selama ini daerah hanya merupakan pelaksana dari berbagai program pusat, sekarang daerah harus membuat rencana sendiri sesuai dengan kondisi objektif masing-masing kabupaten/ kota. Seiring dengan perkembangan jaman, tantangan yang dihadapi dunia pendidikan ke depan semakin berat.

Selain kondisi internal yang belum memenuhi standar minimal untuk suatu proses pembelajaran yang ideal, juga tantangan yang datang dari luar makin berat. Banyak tantangan dari luar yang dihadapi oleh sektor

pendidikan. Tantangan-tantangan itu ,misalnya : perkembangan ilmu dan teknologi semakin cepat, era globalisasi yang mempertipis batas antara negara dengan negara, adanya pengaruh sosial budaya dari berbagai negara, lemahnya kemampuan masyarakat dalam membiayai pendidikan dan lain sebagainya.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, bahkan masih banyak kegagalan dalam implementasinya di lapangan. Kegagalan demi kegagalan antara lain disebabkan oleh manajemen yang kurang tepat, penempatan tenaga pendidikan tidak sesuai dengan bidang keahliannya, dan penanganan masalah bukan oleh ahlinya, sehingga tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan mutu pada setiap jenis dan jenjang pendidikan belum dapat diwujudkan.

Upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan. Mengingat hal tersebut, maka pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencetak generasi yang berkualitas untuk meneruskan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa yang akan datang. Peranan pendidikan diantaranya adalah mempersiapkan siswa agar memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap untuk disumbangkan bagi kesejahteraan umum sebagai warga negara yang aktif.

Kebijakan pemerintah mengenai wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (wajib 9 tahun) merupakan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan Pendidikan Nasional, dan program tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap pendidikan. Era tehnologi dan komunikasi yang semakin berkembang pesat di saat ini, menuntut lembaga pendidikan bertanggung jawab dalam mempersiapkan sisiwa untuk menghadapi dunia luar yang penuh dengan persaingan dan tantangan.

Masalah pemerataan pendidikan mengarah kepada kebijakan pendanaan atau pembiayaan yang dikeluarkan untuk semua kebutuhan dalam proses

belajar mengajar, misalnya pemberian beasiswa langsung kepada siswa yang tidak mampu dan siswa yang berprestasi, pemberian subsidi bagi sekolah untuk membiayai siswa dari keluarga tidak mampu. Sedangkan masalah efektifitas dan efisiensi pendidikan menyangkut kemampuan pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan berkenaan dengan seberapa sumber-sumber potensial pendidikan baik yang bersifat manusiawi maupun non manusiawi yang sangat terbatas dapat dioptimalkan penggunaannya. Masalah-masalah pendidikan tersebut hendaklah segera dipecahkan sebagai konsekuensi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan keberhasilan dari tujuan pendidikan.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal merupakan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar antara guru dengan siswa yang melibatkan berbagai unsur yang saling berkaitan. Unsur-unsur tersebut antara lain guru, siswa, lingkungan, bahan ajar, evaluasi serta media belajar. Kegiatan belajar mengajar sendiri dilakukan dengan sasaran agar hasil proses pendidikan tersebut dapat bermanfaat bagi siswa itu sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor yang bersifat internal dan eksternal. Salah satu faktor yang bersifat eksternal adalah faktor lingkungan, baik lingkungan keluarga, masyarakat maupun sekolah yang dapat berupa lingkungan fisik dan non fisik.

Lingkungan fisik berupa gedung sekolahan, perpustakaan, laboratorium, lapangan, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan non fisik bisa berupa suasana belajar, kondisi fisiologis, pergaulan, dan lain-lain,. Hal inilah yang membuat sekolah harus menyediakan kondisi yang sedemikian rupa demi terlaksananya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Kondisi yang dimaksud adalah tersedianya sarana, alat, media serta lingkungan yang tepat dalam membantu kelancaran serta kemudahan bagi guru untuk menyampaikan materi pada siswa sehingga siswa dapat mentransfer materi tersebut dengan mudah.

Pencanangan wajar 9 tahun saat ini mengalami berbagai hambatan. Fenomena yang ada, masih banyak anak-anak bangsa yang masih berusia sekolah tidak dapat mengenyam pendidikan yang disebabkan oleh beberapa faktor, terutama faktor ekonomi. Kondisi ekonomi masyarakat Indonesia saat ini sebagian besar berada pada golongan ekonomi menengah ke bawah. Seperti pepatah Jawa mengatakan "Jer Basuki Mawa Bea", yang dalam hal ini dapat diartikan bahwa pendidikan membutuhkan biaya untuk mencapai keberhasilan pendidikan.

Salah satu penyebab rendahnya partisipasi pendidikan dari masyarakat adalah tingginya biaya pendidikan, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung seperti iuran sekolah, buku, seragam, alat tulis dan lain-lain. Sedangkan biaya tidak langsung seperti biaya transportasi, biaya kursus, uang saku dan biaya lain-lain. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan "Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar". Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut, maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMPMTs serta satuan pendidikan yang sederajat).

Pada dasarnya pendidikan gratis merupakan penyelenggaraan pendidikan yang tidak memungut dana dari orang tua, seluruh kebutuhan operasional diupayakan lewat APBD, dan besaran dana dihitung sesuai unit cost tiap siswa. Upaya pembebasan biaya pendidikan bagi peserta didik di sekolah merupakan perwujudan dari upaya membuka akses luas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang merupakan hak dari setiap warga negara.

Kebijakan pendidikan gratis yang semula untuk membantu meringankan beban masyarakat, ternyata sudah dipolitisir yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan baru, baik lingkup internal maupun eksternal. Kebijakan tersebut dinilai belum maksimal dalam tingkat keberhasilannya, karena dalam pelaksanaannya banyak yang tidak sesuai, masih adanya pungutan atau penarikan dana di sekolah, hingga muncul persepsi yang

negatif dimata masyarakat karena banyak munculnya masalah pungutan untuk sumbangan guna kepentingan sekolah.

Banyak orasi yang menyatakan sekolah gratis untuk jenjang SD dan SMP bahkan sampai jenjang SMA/SMK. Namun pada kenyataannya masih banyak anak dari keluarga miskin yang tidak bisa menikmati bangku pendidikan. Apakah ini yang dinamakan keadilan? Pada kenyataannya layanan pendidikan, terutama melalui jalur pendidikan formal dan nonformal belum dapat diakses oleh semua warga negara terutama bagi kelompok tak beruntung, baik aspek fisik, mental, intelektual, geografis, ekonomis, maupun kultural. Menurut UU No. 20 tahun 2003, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Prinsip pendidikan tersebut dijadikan acuan dalam memberikan layanan pendidikan nasional, Namun prakteknya tidak sedikit pemerintah dan masyarakat belum berhasil mewujudkan layanan pendidikan bermutu untuk semua. Banyak faktor yang belum mendukung sepenuhnya dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, terlebih-lebih di era pasca reformasi. Untuk itu dapat diidentifikasi dan dicarikan solusinya, sehingga pendidikan untuk semua dapat diwujudkan, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi semua.

Salah satu usaha untuk melaksanakan perbaikan dalam bidang pendidikan tersebut adalah dengan pelaksanaan kebijakan sekolah gratis oleh pemerintah kabupaten berdasarkan otonomi daerah yang berlaku saat ini. Pencanaan program tersebut patut diacungi jempol. Karena kendati penuh dengan sorotan tajam, namun ini merupakan langkah berani di tengah sulitnya biaya pendidikan diberbagai daerah. Usaha Pemerintah kabupaten setempat dalam melaksanakan program ini adalah menggratiskan biaya pendidikan bagi seluruh siswa dari jenjang dasar sampai menengah. Menyediakan pendidikan murah dan mudah bagi rakyat yang berarti

pendidikan harus diselenggarakan untuk rakyat yang harus mudah diikuti atau dijangkau untuk semua rakyat.

DI Kabupaten Sleman telah diterapkan bagi siswa miskin pemegang Kartu Keluarga Miskin (KKM), dapat bersekolah gratis di SMA, SMK, dan MA. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Sleman, Arif Haryono mengatakan pihaknya sudah mensosialisasikan kepada kepala SMA/SMK terkait pelampiran KMM bagi calon siswa tidak mampu.

Program Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah (JPPD) salah satu langkah yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Sleman, DIY melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga untuk membantu siswa kategori miskin jenjang SMA/SMK/MA. Kuota JPPD dialokasikan untuk 8.269 siswa yang bersekolah di Sleman. Dan, sebanyak 859 siswa di wilayah lain. Siswa dari Sleman tersebar. Ada pula yang bersekolah di Kota Yogyakarta, Magelang, bahkan Klaten.

Menurut Kepala Seksi kelembagaan bidang Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (PPNFI) Dinas Dikpora Sleman, Eko Suharyono, Sleman diklaim menjadi Kabupaten yang memiliki Lembaga Pendidikan & Kejuruan (LPK) terbanyak di DIY, sekitar 90-an lembaga itu aktif menerima peserta didik. Di Kecamatan Cangkringan Sleman terdapat 554 orang yang tidak sekolah seperti yang akan di jelaskan di tabel bawah ini:

Tabel 1. Data Hasil Konsolidasi dan Pembersihan Database Kependudukan Kecamatan Cangkringan

Desa / Kelurahan	Tidak Sekolah			Belum Tamat SD		
	L	P	LP	L	P	LP
Argomulyo	40	94	134	61	62	123
Wukirsari	65	101	166	74	104	178
Glagaharjo	64	52	116	35	29	64
Kepuharjo	14	21	35	14	14	28
Umbulharjo	40	63	103	41	17	58
Jumlah	223	331	554	225	226	451

Sumber: Data Hasil Konsolidasi dan Pembersihan Database Kependudukan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 2018.

Sebagian besar anggota masyarakat Kecamatan Cangkringan yang ada di desa Glagaharjo Kecamatan Cangkringan menempati hunian baru, yang sering disebut Hunian Tetap (Huntap), misalnya di Hunian Tetap (Huntap) Banjarsari dan Huntap Jetis Sumur Glagaharjo. Kehidupan masyarakat di tempat yang baru memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi tempat tinggal yang baru.

Salah satunya sekolah informal adalah Sekolah Gunung Merapi (SGM) yang beralamat di Jalan Bebung, Pangukrejo, Cangkringan Sleman Yogyakarta. Sekolah ini secara resmi berdiri sejak desember 2015. Menempati bekas sekolah SD Pangukrejo yang disulap menjadi tempat belajar sekaligus bermain yang ramah terhadap lingkungan. Sekolah Gunung Merapi diinisiasi oleh Yasmin Winnett dan Fajar Radite atas keprihatinan terhadap kondisi masyarakat pasca erupsi besar tahun 2010. Sekolah informal ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu dalam hal mitigasi, edukasi dan sustainability. Saat ini terdapat 50 anak usia SD-SMP yang ikut belajar di Sekolah Informal Gunung Merapi.

Selama ini, sekolah gunung merapi menjadi tempat anak-anak dileheng gunung merapi untuk belajar dan bermain. Namun demikian, keberlangsungan sekolah informal ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Lokasi bekas SD Pangukrejo yang dipakai hanya kami perbaiki alakadarnya, atap sering bocor kala hujan, kamar mandi masih terkendala air dan kurang nyaman.

Dalam penyesuaian ini ditemukan beberapa persoalan mendasar, antara lain; persoalan yang berkaitan sikap dan perilaku anggota masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan, pola interaksi anggota masyarakat yang dulu relatif longgar ditempat baru relatif lebih dekat dan intensitas ketemuanya lebih sering, sehingga sering menimbulkan gesekan-gesekan (konflik) antar

anggota masyarakat. Sebagian besar lahan pertanian dan lahan pekerangan belum dapat diolah karena masih tertimbun pasir dan bebatuan, akses dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sangat sedikit, Mengingat sebagian besar yang tinggal di tempat baru memiliki pekerjaan petani dan buruh tani. Di samping itu belum adanya panduan dalam pengelolaan lingkungan khususnya dalam pemanfaatan lahan pekarangan dengan menanam sayuran dalam berbagai cara yang layak di gunakan oleh anggota masyarakat.

Selain itu, latar belakang lain yang turut memperkuat gagasan ini yakni adanya fakta bahwa masih banyak anak usia sekolah terutama dari kalangan ekonomi lemah yang belum dapat mengenyam bangku sekolah ataupun yang terpaksa harus putus sekolah lantaran permasalahan klasik, yaitu tingginya biaya pendidikan. Salah satu indikator penuntasan program wajar 9 tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP.

Pada tahun 2008 APK SMP telah mencapai 96,18 %, sehingga dapat dikatakan bahwa program wajar 9 tahun telah tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Program BOS yang dimulai sejak Juli 2005 telah berperan sangat besar dalam percepatan pencapaian wajar 9 tahun tersebut dan pada tahun 2009 ini pemerintah menaikkan biaya satuan BOS secara signifikan yang akan menjadi pilar untuk wilayah Indonesia.

mewujudkan pendidikan gratis di tingkat pendidikan dasar secara nasional seluruh wilayah Indonesia. Ini merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan amanat UUD perihal 20% anggaran untuk pendidikan. Berdasarkan dari penjelasan yang telah penulis jabarkan diatas, maka penulis dalam penelitian ini hendak mengangkat sebuah judul yaitu, “Analisis Program Pendidikan Gratis di Kecamatan Cangkringan, Sleman, Yogyakarta”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut, yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana analisis program pendidikan gratis di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Tahun 2017-2018?
2. Faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam menerapkan program pendidikan gratis di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis program pendidikan gratis di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam menerapkan program pendidikan gratis di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian ilmu pemerintahan dan menuangkannya kedalam bentuk tulisan.
 - b. Mengembangkan penalaran dan khasanah ilmu pemerintahan membentuk pola pikir yang dinamis dan mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu pemerintahan selama ini khususnya dalam lingkup pendidikan.
 - c. Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran menunjang perkembangan ilmu pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Siswa, sebagai masukan bagi siswa untuk menumbuhkan motivasi siswa terhadap pentingnya mengenyam bangku sekolah sebagai wujud dari pemerataan pendidikan bagi semua anak Indonesia.
- b. Pendidikan, menambah khasanah ilmu serta cakrawala pandang bagi perkembangan pendidikan, bahwa pendidikan mempunyai peranan yang sangat besar dalam meningkatkan kelancaran proses belajar mengajar.
- c. Sekolah, sebagai masukan bagi sekolah yang bersangkutan dalam usahanya untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis.

E. Literatur Review

1. Penelitian yang dilakukan oleh Irwan Criswanto dengan judul “Analisis Implementasi Program Pendidikan Gratis” (Studi kasus pada Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Ajung Kabupaten Jember). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan 90 responden, menggambarkan 95% orang tua wali murid sangat setuju dan mendukung pelaksanaan pendidikan gratis, 89% orang tua wali murid sangat terbantu dengan adanya pendidikan gratis, 89% orang tua wali murid sangat puas atas pelaksanaan pendidikan gratis, dan 80% orang tua wali murid menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan gratis di Kecamatan Ajung Kabupaten Jember benar-benar terealisasi dengan maksimal.

Implementasi Program Pendidikan Gratis di Kecamatan Ajung kabupaten Jember dilakukan dengan cara perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan gratis, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta melibatkan peran masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan. Faktor -faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi program pendidikan gratis di Kecamatan Ajung Kabupaten Jember ialah komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Penggunaan dana alokasi pendidikan gratis dikelola oleh masing-masing sekolah yang digunakan untuk biaya SPP dan biaya-biaya lain yang menunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan pada analisis program pendidikan gratisnya serta mengetahui faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam menerapkan program pendidikan gratis di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.

2. Penelitian oleh Dewi Amelia Lestari dan Edy Susena dengan judul “Analisis pendidikan gratis di sma-smk di Surakarta menuju pendidikan Indonesia yang berkeadilan”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa

(1). Pendidikan di kota Surakarta belum dapat dirasakan oleh semua lulusan SMP atau yang sederajat, terbukti masih banyak lulusan SMP atau sederajat yang tidak melanjutkan ke sekolah SMA atau SMK, (2). Pendidikan berkeadilan di era globalisasi adalah pendidikan yang memberikan hak kepada semua warga negara untuk mendapatkan pendidikan baik golongan kaya maupun yang tidak mampu, pendidikan yang sesuai dengan perekonomian keluarga, pendidikan yang tidak melihat latar belakang siswa, pendidikan adil bagi nusa dan bangsa, (3). Untuk mewujudkan keadilan dalam pendidikan Indonesia adalah dengan memberikan fasilitas yang sama antar sekolah baik di negeri maupun swasta, untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan yang berkualitas di era globalisasi dengan cara memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan sekolah, pendidikan yang mengedepankan kesetaraan pada semua siswa tidak ada perbedaan gender, suku, agama dan ras, pendidikan yang merata bagi seluruh siswa, pendidikan yang dirasakan oleh semua kalangan bawah dan tidak mampu, (4). Program pendidikan gratis yang difasilitasi oleh pemerintah belum dapat diterapkan 100% oleh sekolah karena bantuan dari pemerintah belum dapat mencukupi biaya operasional sekolah sehingga program sekolah gratis di Kota Surakarta belum dapat dirasakan oleh semua masyarakat, (5). Di kota Surakarta hanya ada satu sekolah yang benar-benar menggratiskan biaya pendidikan bagi siswanya, sama sekali tidak memungut biaya dari siswa. Sekolah tersebut adalah : SMK IT Smart Informatika. Akan tetapi terbatas hanya 60 siswa baru. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan pada analisis program pendidikan gratisnya serta mengetahui faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam menerapkan program pendidikan gratis di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Suyahman dengan judul “Analisis Kebijakan Pendidikan Gratis di Sekolah Menengah Atas Dalam Kaitannya Dengan Kualitas Pendidikan Menengah Atas”. Berdasarkan uraian analisis

kebijakan gratis pendidikan Menengah Atas dalam kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan menengah atas maka dapat disimpulkan:

1) Kebijakan pendidikan gratis pendidikan menengah merupakan kebijakan yang tepat dalam upaya pemerataan pendidikan menengah di seluruh wilayah Indonesia khususnya bagi kalangan sosial ekonomi yang terbatas. 2) Kebijakan pendidikan gratis pendidikan menengah dirasakan kurang mencerminkan asas keadilan jika pelaksanaannya seperti saat ini, karena juga dinikmati oleh kalangan ekonomi ke atas. 3) Kebijakan pendidikan gratis pendidikan menengah secara kuantitas berhasil akan tetapi secara kualitas belum berhasil karena tidak diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan menengah ke atas. 4) Kebijakan pendidikan gratis pendidikan menengah atas ke depan harus dibuat formulasi baru dengan mempertimbangkan asas keadilan dan disertai sanksi hukum yang tegas untuk memberikan aspek jera bagi yang melakukan pelanggaran. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan pada analisis program pendidikan gratisnya serta mengetahui faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam menerapkan program pendidikan gratis di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Asrul Alamsyah (2013). Analisis Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Gratis Di Desa Bontotanga Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba. Sejalan dengan program pemerintah kabupaten Bulukumba yang mengarahkan pada kebijakan pendidikan sebagai salah satu program andalan, arah pembangunan kabupaten Bulukumba memuat kebijakan rencana pembangunan untuk menjadi pedoman pembangunan daerah tersebut sesuai dengan visi Kabupaten Bulukumba, “Membangun Desa, Menata Kota Melalui Kemandirian Lokal Yang Bernafaskan Keagamaan” dengan adanya Program Pendidikan

Gratis ini bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis memandang perlu mengkaji lebih lanjut berbagai masalah yang berkaitan dengan implementasi program pendidikan gratis di Desa Bontotanga Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba. Sejalan dengan adanya program pendidikan gratis di Sulsel dan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang pendidikan gratis di Sulsel, pemerintah kabupaten Bulukumba telah menetapkan dalam Peraturan Daerah No. 4 tahun 2009 tentang pelaksanaan pendidikan gratis di kabupaten Bulukumba. sehingga mendorong penulis memilih judul :“Analisis Implementasi Program Pendidikan Gratis Di Desa Bontotanga Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba”.

F. Kerangka Teori

1. Konsep Kebijakan Publik

Seiring dengan berkembangnya masalah-masalah di dunia, berkembang pulalah usaha yang dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Dalam usaha untuk memecahkan masalah-masalah yang terdapat di tengah-tengah kehidupan masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan banyak kebijakan.

Recently the terms "governance" and "good governance" are being increasingly used in development literature. The concept of "governance" is not new. It is as old as human civilization. Simply put "governance" means: the process of decision-making and the process by which decisions are implemented (or not implemented). (<http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.asp>)

Batasan diatas menjelaskan bahwa baru-baru ini istilah pemerintahan (*government*) dan tata pemerintahan (*good governance*) yang baik sering digunakan dalam literatur pembangunan. Konsep pemerintahan bukan merupakan hal yang baru karena sudah ada sejak adanya peradaban manusia. Secara sederhana tata (*good*) berarti : proses pengambilan keputusan atau kebijakan dan proses dengan mana keputusan/kebijakan itu

diimplementasikan (atau tidak diimplementasikan). Dari pengertian tersebut diperoleh gambaran bahwa *good governance* adalah cara bagaimana kekuasaan pemerintah baik pusat maupun daerah digunakan untuk mengelola sumber daya-sumber daya ekonomi dan sosial untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Thomas R Dye (Warassih, 2005) menjelaskan bahwa kebijakan negara atau *public policy is whatever goverments choose to do or not to do* (pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah). Menurut Anderson dan Dye,⁹ ada 3 (tiga) alasan mempelajari kebijakan negara yaitu, *pertama* dilihat dari sudut alasan ilmiah (*scientific reason*), kebijakan negara dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai hakekat dan asal mula kebijakan negara, berikut proses-proses yang mengantarkan perkembangannya serta akibat-akibatnya pada masyarakat; *kedua* dilihat dari sudut alasan profesional (*profesional reason*), maka studi kebijakan negara dimaksudkan untuk menerapkan pengetahuan ilmiah di bidang kebijakan negara guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari.

Sehubungan dengan ini, terkandung suatu pemikiran tentang faktor-faktor yang membentuk kebijakan negara, atau akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kebijakan tertentu, maka perlu dipertimbangkan bagaimana individu, kelompok atau pemerintah dapat bertindak guna mencapai tujuan mereka; *ketiga*, dilihat dari sudut alasan politis (*political reason*), maka mempelajari kebijakan negara pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat, guna mencapai tujuan yang tepat pula. Dengan kata lain, studi kebijakan negara dalam hal ini dimaksudkan untuk menyempurnakan kebijakan negara yang dibuat oleh pemerintah.

Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan memberi arti kebijakan sebagai suatu pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah, sedang Carl J. Friedrich mendefinisikan kebijakan sebagai "...serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.”(Purwono, 1989)

Ragam kebijakan yang dibuat ada beberapa jenis, *pertama* kebijakan yang dibuat oleh legislatif secara tunggal (Undang-undang Dasar, Ketetapan MPR), *kedua* kebijakan yang dibuat dalam bentuk kerja sama antara legislatif dan eksekutif (undang-undang). *Ketiga* adalah kebijakan yang dibuat oleh eksekutif saja, karena di dalam perkembangan kebijakannya peran eksekutif tidak cukup hanya melaksanakan kebijakan yang dibuat legislatif. Semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan bersama diperlukan kebijakan-kebijakan untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat umum yang dibuat legislatif (UUD, TAP MPR, UU, dll).

Dalam studi kebijakan publik, maka kebijakan-kebijakan tertulis formal inilah yang menjadi pusat perhatian. Proses implementasi sangat erat dengan kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang diputuskan dan ditetapkan bermuara untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat (publik), menurut Friedrich mendefinisikan kebijakan sebagai :”serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.

Sedangkan James E Anderson menyatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu (Islami, 2004). WI. Jenkins merumuskan kebijakan sebagai : serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seseorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada

prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Sedangkan kebijakan menurut Heins Eulau dan Keneth Prewith adalah keputusan yang teguh yang disifati oleh adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari keduanya yakni bagi orang-orang yang membuatnya dan bagi orang-orang yang melaksanakannya. Kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu.

Dalam pandangan David Easton ketika pemerintah membuat kebijakan publik, maka ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya. Sedangkan Harold Laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat.

Ketika kebijakan publik berisi/mengandung nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktika-praktika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Kebijakan menurut Graycar (Keban, 2004) dapat dilihat sebagai konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Dalam konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai suatu serangkaian kesimpulan dan rekomendasi; sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu sistem organisasi, sehingga dapat mengetahui apa yang diharapkan dari program dan mekanisme kerja dalam mencapai produknya serta sebagai suatu kerangka kerja. Kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isuisu dan metode implementasinya.

2. Evaluasi Kebijakan

Menurut Anderson dalam Winarno (2008:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2008:166) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya.

Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupunterhadap hasil (outcome) atau dampak (impact) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.

a. Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan

James Anderson dalam Winarno (2008 : 229) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut:

1) Tipe pertama

Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

2) Tipe kedua

Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.

3) Tipe ketiga

Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

Berdasarkan ketiga tipe tersebut yang paling sesuai dalam penelitian ini adalah tipe yang ketiga, yakni tipe evaluasi kebijakan sistematis, di mana peneliti ingin melihat sejauh mana pelaksanaan Kebijakan program pendidikan gratis, dengan mencari tahu apakah kebijakan yang dijalankan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Edi Suharto (2012:61), tujuan kebijakan publik sosial, dalam konteks pembangunan sosial, kebijakan sosial merupakan suatu perangkat, mekanisme, dan sistem yang dapat mengarahkan dan menterjemahkan tujuan-tujuan pembangunan. Kebijakan sosial senantiasa berorientasi kepada pencapaian tujuan sosial. Tujuan sosial ini mengandung dua pengertian yang saling terkait, yakni memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial.

Menurut Edi Suharto (2012: 86), model-model yang umumnya digunakan dalam analisis kebijakan publik adalah:

- 1) Model Prospektif adalah bentuk kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan sebelum suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut juga model prediktif.
- 2) Model Retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah kebijakan diimplementasikan. Model ini biasa disebut model evaluatif, karena banyak melibatkan pendekatan evaluasi terhadap dampak-dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan.
- 3) Model Integratif adalah model perpaduan antara kedua model diatas. Model ini kerap disebut sebagai model komprehensif atau model holistik, karena analisis dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul, baik sebelum maupun sesudah suatu kebijakan dioperasikan.

b. Dimensi Evaluasi Kebijakan

Menurut Winarno (2002: 171-174) setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan dampak dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi:

- 1) Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat
- 2) Kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan
- 3) Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang
- 4) Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik
- 5) Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Menurut M Solly Lubis (2007: 35), pada bidang ekonomi pemerintah harus mengatasi masalah ekonomi, perbedaan yang menyolok antara kaya dan miskin, antara ekonomi lemah dan ekonomi kuat, ketidak merataan kesempatan kerja dan ketidakrataan pendapatan nasional. Menurut Subarsono (2012: 122) dampak merupakan akibat lebih jauh pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan.

Evaluasi kebijakan secara sederhana menurut William Dunn dalam Agustino (2008:187), berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat kebijakan hasil kebijakan. Ketika ia bernilai bermanfaat bagi penilaian atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut member sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi evaluator, secara khusus, dan pengguna lainnya secara umum. Hal ini dikatakan bermanfaat apabila fungsi evaluasi kebijakan memang

terpenuhi dengan baik. Salah satu fungsi evaluasi kebijakan adalah harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan.

3. Pendidikan Gratis

Adapun itu menurut Radja mudyaharjo (2002:1) mengatakan: “pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup.pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu”.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Pendidikan gratis adalah pembebasan segala biaya penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik/orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah.

a. Manfaat Pendidikan Gratis

- 1) Menjamin tersedianya, lahan, sarana dan prasarana pendidikan gratis
- 2) Pendidikan, tenaga kependidikan, dan biaya operasional penyelenggaraan dengan pembagian beban tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang mengantar pendidikan.
- 3) Menopang terselenggaranya dan suksesnya wajib belajar sembilan tahun.
- 4) Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh warga masyarakat usia sekolah dan mengantisipasi kesenjangan masyarakat khususnya hak untuk memperoleh pendidikan dan sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan bahagian dari upaya pencerdasan Bangsa.

b. Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan pemerataan kesempatan belajar bagi semua anak usia sekolah.
- 2) Meningkatkan mutu penyelenggaraan dan lulusan.
- 3) Meningkatkan relevansi pendidikan yang berbasis kompetensi agar dapat mengikuti perkembangan global.
- 4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan gratis untuk memenuhi mutu dan produktivitas sumber daya manusia yang unggul.

G. Definisi Konseptual

Konsep adalah unsur penelitian dan merupakan definisi yang dipakai suatu fenomena sosial. Konsep merupakan generalisasi dari kelompok tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama.

Definisi konsep adalah unsur penelitian yang terpenting dan merupakan definisi yang dipakai secara abstrak suatu fenomena sosial dan fenomena alami. Semakin dekat suatu konsep dengan realitas, maka semakin mudah suatu konsep di ukur. Maka dalam penelitian suatu konsep didefinisikan dengan jelas sehingga dapat dipahami dengan jelas.

Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah :

1. Pendidikan adalah investasi bagi masa datang. Kesadaran masyarakat terhadap dunia pendidikan untuk saat ini semakin meningkat. Biaya sekolah yang meningkat tidak mengurangi semangat para orang tua untuk

memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Tidak ada pendidikan yang berkualitas dengan harga yang murah. Apalagi di abad ilmu pengetahuan saat ini, memiliki ilmu pengetahuan yang berkualitas memerlukan dana yang memadai adalah apapun juga yang dipilih oleh pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (*whatever government choose to do or not to do*).

2. Analisis kebijakan publik berdasarkan kajian kebijakannya dapat dibedakan antara analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik tertentu dan sesudah adanya kebijakan publik tertentu. Analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik berpijak pada permasalahan publik semata sehingga hasilnya benar-benar sebuah rekomendasi kebijakan publik yang baru. Keduanya baik analisis kebijakan sebelum maupun sesudah adanya kebijakan mempunyai tujuan yang sama yakni memberikan rekomendasi kebijakan kepada penentu kebijakan agar didapat kebijakan yang lebih berkualitas.

3. Evaluasi kebijakan yang digunakan adalah tipe evaluasi kebijakan sistematis, di mana peneliti ingin melihat sejauh mana karakteristik *Good Governance*. Kepala sekolah juga berperan sebagai manajer, mengatur berbagai sumber daya untuk terealisasinya *good govemcmce* di sekolah. Serta kebijakan publik sosial, dalam konteks pembangunan sosial, kebijakan sosial merupakan suatu perangkat, mekanisme, dan sistem yang dapat mengarahkan dan menterjemahkan tujuan-tujuan pembangunan. Kebijakan sosial senantiasa berorientasi kepada pencapaian tujuan sosial. Tujuan sosial ini mengandung dua pengertian yang saling terkait, yakni memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sesuai dengan judulnya penelitian ini menganalisis kebijakan pemerintah mengenai wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Moleong (2009:6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Pengumpulan data secara primer akan dilakukan dengan cara wawancara para informasi dan observasi oleh peneliti sedangkan pengumpulan data secara sekunder akan dilakukan dengan cara pengumpulan dokumen, arsip dari lembaga yang terkait, sehingga pada akhirnya pengumpulan data tersebut akan mendeskripsikan mengenai analisis program pendidikan gratis di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman serta mengetahui faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam menerapkan program pendidikan gratis di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.

2. Obyek Penelitian

Moleong menyatakan cara terbaik yang ditempuh dengan mempertimbangkan substansi dan menjajaki lapangan dan untuk mencari kesesuaian dengan melihat kenyataan di lapangan. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Dinas Pendidikan yang telah menerapkan pendidikan gratis serta warga di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data primer yang dibutuhkan dengan melakukan

pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan terhadap program pendidikan gratis dalam dinas pendidikan di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman yang telah menerapkan pendidikan gratis.

b. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2009:186).

Wawancara yaitu mengumpulkan data primer dengan jalan mewawancarai sumber-sumber data dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan program pendidikan gratis dalam dinas pendidikan di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman yang telah menerapkan pendidikan gratis.

Informan adalah orang-orang yang memberikan informasi kepada peneliti karena orang tersebut dipandang mengetahui permasalahan yang dikaji peneliti. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati merupakan data sumber utama dalam melakukan penelitian. Informan yang dipilih peneliti adalah orang-orang yang dipandang benar-benar mengetahui permasalahan, sehingga dapat diperoleh data/informasi yang obyektif. Informan yang dipilih pada penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Sekolah di Kecamatan Cangkringan, Sleman
- 2) Wakil Kepala Sekolah di Kecamatan Cangkringan, Sleman
- 3) Bendahara Pengelola Dana di Kecamatan Cangkringan, Sleman
- 4) 2 Guru di Kecamatan Cangkringan, Sleman
- 5) 2 Komite Sekolah di Kecamatan Cangkringan, Sleman
- 6) 3 Wali murid di Kecamatan Cangkringan, Sleman

7) 3 Siswa di Kecamatan Cangkringan, Sleman

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian, dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data, dan merupakan bahan utama dalam penelitian.

4. Teknik Analisa Data

Tahap selanjutnya setelah data-data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data, mendeskripsikan data, serta mengambil kesimpulan. Untuk menganalisis data ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, karena data-data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dilokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terperinci. Dalam bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian Data

Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, foto, gambar bagan, table dengan tujuan mempermudah penyampaian makna penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, yang dituangkan dalam kesimpulan. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara serta dokumentasi hasil penelitian.